KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP**
Jl KH. Agus Salim No. 286, Sumenep, Jawa Timur, kode pos 69412

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

## TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RKT Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan strategis dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang satu tahun ke depan. Penyusunannya berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 serta realisasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025. Seluruh tahapan tetap mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), target kinerja, strategi pencapaian, serta penetapan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Penyusunan RKT ini juga bertujuan sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, guna menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini dilakukan demi menjamin keselarasan sasaran dan target kinerja antara jajaran pimpinan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan unit kerja di bawahnya.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, RKT ini berfungsi sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Melalui dokumen ini, proses monitoring dan evaluasi secara berkala (Triwulan I hingga IV) dapat dilakukan secara terukur guna memastikan target tercapai tepat waktu dengan kualitas yang optimal.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, realisasi kinerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dapat terwujud sesuai harapan. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Sumenep, 05 Januari 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep




Abdul Wasid

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika

BAB II : RENCANA KINERJA TAHUN 2025

A. Visi dan Misi Kementerian Agama

B. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

C. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rencana Target Kinerja Tahun 2025

D. Dukungan Anggaran

BAB III : RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA

A. Struktur Anggaran dan Target Nilai Kinerja Anggaran

B. Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran

C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV

BAB IV : PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Matriks Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Triwulan Tahun 2025
3. Matriks Rencana Aksi Tahun 2025
4. Matriks Rencana Penarikan Dana Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) target-target yang ditetapak sesuai program, kegiatan dan anggaran ditetapkan dalam Renstra.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Target kinerja tahunan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 serta tugas dan fungsi serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;

3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.

## B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 945 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025-2029; dan
12. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Nomor 1202 tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementterian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029.

## C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan sasaran strategis dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama untuk mencapai target kinerja tahunan yang efektif dan akuntabel

Sehingga RKT digunakan sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Sasaran Tahunan, supaya sasaran kinerja tahunan yang terukur, realistis, dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan agama, pelayanan keagamaan, dan moderasi beragama.
2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran, sesuai dengan alokasi dana APBN dan kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang agama, pendidikan keagamaan, dan layanan haji, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan capaian kinerja tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peningkatan Daya Saing, yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, moderasi beragama, dan penguatan kerukunan umat beragama yang menjadi prioritas Kementerian Agama.

## D. Sistematika

Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 diawali dengan menampilkan Kata Pengantar dan Daftar Isi. Selanjutnya disusun Bab-Bab sebagai berikut :

Bab I menampilkan Pendahuluan dengan menjabarkan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Landasan Hukum yang terkait dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Pada Bab II dijabarkan tentang Perjanjian Kinerja yang membahas dan menjelaskan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis terkait dengan Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025, Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya dan Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya.

Bab III menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan dengan menjabarkan Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Rencana Kegiatan Triwulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Pada Bab IV menjelaskan tentang Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana dengan menjabarkan Struktur Anggaran dan Target Nilai Kinerja Anggaran, *Cascading* Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran serta Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV. Sedangkan Bab V berisi Penutup dan Lampiran.

# BAB II
# PERJANJIAN KINERJA

## A. Visi dan Misi Kementerian Agama

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di sektor agama dan pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menyusun tujuan dan sasarannya dengan mengacu pada Renstra Kanwil Kemenag Jawa Timur serta Renstra Pusat. Visi utama Kementerian Agama untuk periode 2025–2029 berbunyi: “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Cita-cita ini menjadi representasi dedikasi kolektif dalam menciptakan bangsa Indonesia yang harmonis, makmur, serta memiliki daya saing unggul demi menyongsong impian besar Indonesia Emas 2045. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi inti dari visi Kementerian Agama tersebut, yakni Rukun, Maslahat, dan Cerdas.

1. Rukun

   Pilar pertama, Rukun, menjadi fondasi interaksi sosial yang selaras di tengah keberagaman kelompok, baik itu antarumat beragama, suku bangsa, maupun relasi antara warga dengan negara. Konsep ini mencakup tiga dimensi krusial, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kolaborasi. Toleransi dimaknai sebagai tindakan saling menghargai perbedaan iman, tata cara ibadah, serta menjamin kebebasan beragama tanpa adanya paksaan ideologi kepada pihak lain. Kesetaraan menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang identik dalam mempraktikkan keyakinannya tanpa bayang-bayang diskriminasi. Sementara itu, kolaborasi merupakan kesiapan untuk terlibat dalam kegiatan kolektif di bidang sosial dan ekonomi, yang memperkuat ikatan batin dalam lingkungan tinggal, organisasi profesi, hingga komunitas minat.

2. Maslahat

   Pilar kedua, Maslahat, dalam perspektif religi diartikan sebagai pengamalan agama yang kontekstual, di mana spiritualitas tidak hanya berhenti pada ritual tetapi juga berdampak nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini merupakan manifestasi keberagamaan yang

memprioritaskan kegunaan bagi sesama dan kelestarian alam, mencerminkan nilai-nilai yang mendatangkan kebaikan baik secara personal maupun publik demi terciptanya kemakmuran menyeluruh.

3. Cerdas

   Pilar ketiga, Cerdas, ialah terminologi yang menggambarkan kompetensi individu dalam menyerap, mengkaji, dan mengimplementasikan wawasan secara berdaya guna di berbagai kondisi. Hal ini menggambarkan target kualitas masyarakat yang tangguh secara mental, emosional, sosial, maupun teknis, sehingga setiap orang memiliki kemampuan adaptasi, keahlian memecahkan persoalan, serta ketajaman dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam 8 misi Asta Cita serta berpijak pada tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Agama menyusun misi strategis. Rumusan misi tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian delapan misi nasional, adapun misi Kementerian Agama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;

   Hal ini mendukung aspek "Rukun" sebagai dasar terciptanya harmoni sosial, sementara orientasi pada kemaslahatan menjamin agama menjadi kekuatan positif yang memberikan manfaat nyata bagi publik.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, dan pesantren;

   Langkah ini mendukung aspek "Cerdas" melalui pendidikan bermutu sebagai elemen vital dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai agama, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

   Poin ini merefleksikan urgensi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional guna menyokong pencapaian visi, karena sistem yang baik merupakan prasyarat keberhasilan program-program toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan.

## B. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengadopsi empat tujuan selaras dengan lima sasaran utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat demi kemaslahatan bangsa.

   Tujuan ini diimplementasikan oleh unit kerja di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, serta Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah.
2. Peningkatan jumlah umat beragama yang mendapatkan layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.

   Sasaran ini dilaksanakan oleh unit kerja pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (termasuk KUA) serta Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Zawa).
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang bermutu, berkeadilan, dan terjangkau.

   Agenda ini dijalankan oleh unit kerja di Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, serta Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah.
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani, serta responsif.

   Target ini dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh unit kerja yang ada.

## C. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), dan Rencana Target Kinerja Tahun 2025

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran Kegiatan ini merupakan bagian integral dari sasaran strategis nasional yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka menengah secara menyeluruh, sekaligus memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Rencana Kinerja merupakan salah satu siklus utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Target Kinerja merupakan strategi akselerasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahunan yang wajib direalisasikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Selain itu, Target Kinerja juga menjadi instrumen untuk meningkatkan performa organisasi secara terstruktur dan berjenjang melalui implementasi program-program yang telah disepakati dalam perjanjian. Target Kinerja ini merupakan hasil sinergi pemikiran serta usulan dari seluruh unit kerja yang ada.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian target kinerja yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2025. Data ini berfungsi sebagai lampiran resmi dari dokumen perjanjian kinerja yang menjadi acuan operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama | a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 | Nilai | 83 |
| | | b. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS | Persen | 16,90 |
| | | c. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS | Persen | 79,49 |
| | | d. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi/Pesperani/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha | Persen | 83,33 |
| | | e. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama islam | Persen | 3,52 |
| | | f. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 74,71 |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif dan berdampak | a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (laporan Harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 100 |
| | | b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama | Rasio | 1:24 |
| | | c. Persentase fasilitato bibingan perkawinan agama yang tersertifikasi | Persen | 70,05 |
| | | d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah | Persen | 0,50 |
| | | e. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan | Persen | 8,33 |
| | | f. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat | Persen | 20,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | g. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan | Persen | 0,84 |
| | | h. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional | Persen | 0,50 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji | a. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | Persen | 5 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan | Persen | 80,50 |
| | | b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu | Nilai | 86,50 |
| 5 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | Persen | 81,00 |
| | | b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | Persen | 72,00 |
| 6 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji | a. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) | Persen | 82,05 |
| 7 | Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan | a. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik | Persen | 0,50 |
| 8 | Meningkatnya saran dan prasaran satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas | a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Persen | 30,50 |
| | | b. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha) | Persen | 12,00 |
| | | c. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Persen | 28,64 |
| | | d. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | Jumlah | 2.619 |
| 9 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta | a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:<br>a. Literasi Membaca<br>b. Numerasi | | <br>90,25<br>93,82 |
| | | b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Persen | 92,00 |
| | | c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | 82,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan. | d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Jumlah | 250 |
| | | e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | 0,50 |
| | | f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | 56,00 |
| | | g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | Persen | 74,50 |
| | | h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara | Persen | 0,98 |
| | | i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | 1,00 |
| | | j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 0,30 |
| | | k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | 65,80 |
| | | l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Persen | 51,00 |
| 10 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan. | a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 40,00 |
| | | b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | 1:13 |
| | | c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | 30,00 |
| | | d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 54,54 |
| | | e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | 42,00 |
| | | f. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | 82,00 |
| | | g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | 51,17 |
| | | h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Persen | 87,00 |
| | | i. Persentase guru yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | j. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,69 |
| | | k. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Persen | 89,00 |
| | | l. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | 37,30 |
| 11 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | a. Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | 92,84 |
| 12 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Persen | 60,00 |
| | | b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75 | Nilai | 1,25 |
| 13 | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN | a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 95,00 |
| | | b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Persen | 50,00 |
| | | c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Persen | 100,00 |
| | | d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | Persen | 100,00 |
| | | e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 75,00 |
| 14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai). | a. Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 63,35 |
| | | b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | 65,00 |
| | | c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / Inspiratif | Jumlah | 15 |
| 15 | Meningkatknya Kualitas layanan dan bantuan hukum | a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | 100,00 |
| 16 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum | a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | 72,00 |
| | | b. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | 64,00 |
| 17 | Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi | a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Tingkat | 95,00 |
| | | b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Persen | 11,00 |
| 18 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informas | a. Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,72 |
| | | b. Persentase data statistik yang dipublikasi | Persen | 10,00 |
| 19 | Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan | a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | Persen | 90,00 |
| | | b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama | Persen | 1,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | | 11,00 |
| | | d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Persen | 11,00 |
| | | e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | Persen | 90,00 |
| | | f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Persen | 90,00 |
| | | g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 92,84 |

## D. Dukungan Anggaran

Berdasarkan dokumen DIPA yang berada di bawah wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, rincian anggaran yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan seluruh agenda kegiatan pada tahun 2025 dapat dipaparkan sebagai berikut:

| Kode | Program/Kegiatan/KRO/RO/komponen | Vol | Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **298231** | **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP** | | | **133.196.930.000** |
| **025.01.DC** | **Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama** | | | 5.000.000 |
| 5620 | Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | | | 5.000.000 |
| 5620.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1 | Lembaga | 5.000.000 |
| 5620.QDB.001 | FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik | 1 | Lembaga | 5.000.000 |
| 055 | Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota | | | 5.000.000 |
| **025.01.WA** | **Program Dukungan Manajemen** | | | **133.191.930.000** |
| 2098 | Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN | | | 3.405.000 |
| 2098.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 2098.EBA.957 | Layanan Hukum | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 051 | Layanan Penatausahaan | | | 3.405.000 |
| 2099 | **Pembinaan Administrasi Kepegawaian** | | | 3.405.000 |
| **2099.EBC** | **Layanan Manajemen SDM Internal** | 40 | Orang | 3.405.000 |
| 2099.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | 40 | Orang | 3.405.000 |
| 058 | Pembinaan Kepegawaian | | | 3.405.000 |
| 2100 | Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN | | | 32.707.680.000 |
| **2100.EBA** | **Layanan Dukungan Manajemen Internal** | 12 | Layanan | 32.704.275.000 |
| 2100.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 12 | Layanan | 32.704.275.000 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | | | 32.704.275.000 |
| ***2100.EBD*** | ***Layanan Manajemen Kinerja Internal*** | 4 | Dokumen | 3.405.000 |
| 2100.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 4 | Dokumen | 3.405.000 |
| 052 | Pengelolaan Perbendaharaan | | | 3.405.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2101** | **Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana** | | | 3.405.000 |
| ***2101.EBA*** | **Layanan Dukungan Manajemen Internal** | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 2101.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 051 | Pengelolaan Kelembagaan | | | 3.405.000 |
| **2102** | **Pembinaan Administrasi Perencanaan** | | | 6.810.000 |
| ***2102.EBD*** | ***Layanan Manajemen Kinerja Internal*** | 2 | Dokumen | 6.810.000 |
| 2102.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 | Dokumen | 3.405.000 |
| 052 | Penyusunan Anggaran | | | 3.405.000 |
| 2102.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | Dokumen | 3.405.000 |
| 051 | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | | 3.405.000 |
| **2103** | **Pembinaan Administrasi Umum** | | | 451.143.000 |
| ***2103.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 2 | Layanan | 445.457.000 |
| 2103.EBA.962 | Layanan Umum | 1 | Layanan | 300.000 |
| 052 | Pengelolaan Arsip dan Persuratan | | | 300.000 |
| 2103.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 445.157.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 445.157.000 |
| ***2103.EBB*** | ***Layanan Sarana dan Prasarana Internal*** | 5 | Unit | 5.686.000 |
| 2103.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 5 | Unit | 5.686.000 |
| 052 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | | | 5.686.000 |
| **2106** | Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | | | 3.405.000 |
| ***2106.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 2106.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1 | Layanan | 3.405.000 |
| 053 | Penyediaan Informasi Publik | | | 3.405.000 |
| **6708** | **Dukungan Manajemen Pendidikan** | | | 100.012.677.000 |
| ***6708.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 1 | Layanan | 100.012.677.000 |
| 6708.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 100.012.677.000 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | | | 99.976.602.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 36.075.000 |

| Kode | Program/Kegiatan/KRO/RO/komponen | Vol | Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **299167** | **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP** | | | **5.723.320.000** |
| **025.03.DC** | **Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama** | | | 3.924.414.000 |
| **2104** | **Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah** | 20.000 | Orang | 2.991.364.000 |
| ***2104.QAA*** | ***Pelayanan Publik kepada masyarakat*** | 20.000 | Orang | 2.393.114.000 |
| 2104.QAA.002 | Layanan Nikah dan Rujuk | 20.000 | Orang | 2.393.114.000 |
| 053 | Jasa Profesi dan Transport Penghulu | | | 2.381.114.000 |
| 054 | Fasilitasi Tugas dan Fungsi KUA | | | 12.000.000 |
| ***2104.QDE*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga*** | 9.329 | Keluarga | 456.750.000 |
| 2104.QDE.001 | Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan | 9.189 | Keluarga | 73.000.000 |
| 051 | Bimbingan Keluarga Sakinah | | | 23.500.000 |
| 052 | Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin | | | 49.500.000 |
| 2104.QDE.002 | Bimbingan Keluarga Sakinah – Maslahat | 140 | Keluarga | 383.750.000 |
| 051 | Bimbingan Keluarga Sakinah | | | 383.750.000 |
| ***2104.UAI*** | ***Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan*** | 44 | Lembaga | 141.500.000 |
| 2104.UAI.002 | KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana | 17 | Lembaga | 136.000.000 |
| 054 | Sarana KUA | | | 136.000.000 |
| 2104.UAI.005 | KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System) | 27 | Lembaga | 5.500.000 |
| 051 | KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System) | | | 5.500.000 |
| **2122** | **Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf** | | | 27.040.000 |
| ***2122.BEH*** | ***Bantuan Kelompok Masyarakat*** | 10 | Kelompok Masyarakat | 5.000.0000 |
| 2122.BEH.001 | Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf | 10 | Kelompok Masyarakat | 5.000.0000 |
| 051 | Sertifikasi Tanah Wakaf | | | 5.000.000 |
| ***2122.QDB*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga*** | 1 | Lembaga | 16.140.000 |
| 2122.QDB.001 | Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan | 1 | Lembaga | 16.140.000 |
| 054 | Fasilitasi Kelembagaan | | | 16.140.000 |
| ***2122.QDD*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat*** | 1 | Kelompok Masyarakat | 5.900.000 |
| 2122.QDD.001 | Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF | 1 | Kelompok Masyarakat | 5.900.000 |
| 051 | Kampung Zakat | | | 5.900.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2123** | **Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam** | | | 863.585.000 |
| ***2123.PEG*** | ***Konferensi dan Event*** | 1 | Kegiatan | 13.800.000 |
| 2123.PEG.001 | Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) | 1 | Kegiatan | 13.800.000 |
| 053 | Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 13.800.000 |
| ***2123.QDC*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat*** | 335 | Orang | 795.625.000 |
| 2123.QDC.001 | Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan | 123 | Orang | 762.000.000 |
| 051 | Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non ASN | | | 762.000.000 |
| 2123.QDC.002 | Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya | 162 | Orang | 21.375.000 |
| 051 | Pembinaan Penyuluh | | | 21.375.000 |
| 2123.QDC.003 | Penyuluh Agama Islam Aktif dalan Konten Digital Inklusif Transformatif | 50 | Orang | 12.250.000 |
| 051 | Kompetensi | | | 12.250.000 |
| ***2123.QDD*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat*** | 20 | Kelompok Masyarakat | 26.505.000 |
| 2123.QDD.001 | Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam | 10 | Kelompok Masyarakat | 6.850.000 |
| 051 | Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama | | | 6.850.000 |
| 2123.QDD.002 | Majelis Taklim yang Dibina | 10 | Kelompok Masyarakat | 19.655.000 |
| 051 | Pembinaan SDM/Pengurus | | | 12.655.000 |
| 052 | Bantuan Operasional Majelis Taklim | | | 7.000.000 |
| ***2123.QEI*** | ***Bantuan Lembaga*** | 20 | Lembaga | 27.655.000 |
| 2123.QEI.002 | Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan | 20 | Lembaga | 27.655.000 |
| 051 | Lembaga Dakwah yang Terbina | | | 12.655.000 |
| 053 | Organisasi Sosial Keagamaan yang Terbina | | | 15.000.000 |
| **2124** | **Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah** | | | 42.425.000 |
| ***2124.QDD*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat*** | 10 | Kelompok Masyarakat | 9.350.000 |
| 2124.QDD.001 | Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam | 10 | Kelompok Masyarakat | 9.350.000 |
| 053 | Advokasi dan penanganan konflik | | | 9.350.000 |
| ***2124.QEI*** | ***Bantuan Lembaga*** | 1 | Lembaga | 30.000.000 |
| 2124.QEI.001 | Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan | 1 | Lembaga | 30.000.000 |
| 063 | Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid | | | 30.000.000 |
| ***2124.QMB*** | ***Komunikasi Publik*** | 1 | Layanan | 3.075.000 |
| 2124.QMB.001 | Layanan Syariah dan Hisab Rukyat | 1 | Layanan | 3.075.000 |
| 052 | Pengelolaan Hisab Rukyat | | | 3.075.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **025.03.WA** | **Program Dukungan Manajemen** | | | 1.798.906.000 |
| **2125** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam** | | | 1.798.906.000 |
| ***2125.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 12 | Layanan | 1.714.906.000 |
| 2125.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 12 | Layanan | 1.714.906.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 1.714.906.000 |
| ***2125.EBB*** | ***Layanan Sarana dan Prasarana Internal*** | 7 | Unit | 84.000.000 |
| 2125.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 7 | Unit | 84.000.000 |
| 052 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | | | 84.000.000 |

| Kode | Program/Kegiatan/KRO/RO/komponen | Vol | Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **299168** | **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP** | | | **1.958.050.000** |
| 025.04.DF | Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun | | | 1.442.700.000 |
| **2129** | **Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah** | | | 1.442.700.000 |
| ***2129.QEK*** | ***Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah*** | 1.374 | Orang | 1.442.700.000 |
| 2129.QEK.005 | Siswa MI Penerima BOS | 1.374 | Orang | 1.442.700.000 |
| 004 | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | | | 1.442.700.000 |
| **025.04.WA** | **Program Dukungan Manajemen** | | | 515.350.000 |
| **2135** | **Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam** | | | 515.350.000 |
| ***2135.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 2 | Layanan | 502.600.000 |
| 2135.EBA.956 | Layanan BMN | 1 | Layanan | 5.600.000 |
| 051 | Layanan BMN | | | 5.600.000 |
| 2135.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 497.000.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 497.000.000 |
| ***2135.EBD*** | ***Layanan Manajemen Kinerja Internal*** | 1 | Dokumen | 12.750.000 |
| 2135.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 1 | Dokumen | 12.750.000 |
| 051 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | | 12.750.000 |

| Kode | Program/Kegiatan/KRO/RO/komponen | Vol | Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **299169** | **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP** | | | **177.612.000** |
| 025.09.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | | | 25.480.000 |
| **2126** | **Pembinaan Umrah dan Haji Khusus** | | | 1.320.000 |
| ***2126.QDB*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga*** | 3 | Lembaga | 1.320.000 |
| 2126.QDB.001 | Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina | 3 | Lembaga | 1.320.000 |
| 051 | Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah | | | 660.000 |
| 054 | Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah | | | 660.000 |
| **2147** | **Pelayanan Haji Dalam Negeri** | | | 15.668.000 |
| ***2147.QAA*** | ***Pelayanan Publik kepada masyarakat*** | 374 | Orang | 15.668.000 |
| 2147.QAA.001 | Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri | 374 | Orang | 15.668.000 |
| 054 | Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler | | | 6.432.000 |
| 057 | Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji | | | 4.948.000 |
| 061 | Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah | | | 4.288.000 |
| **2148** | **Pembinaan Haji** | | | 8.492.000 |
| ***2148.QDC*** | ***Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat*** | 955 | Orang | 8.492.000 |
| 2148.QDC.001 | Petugas Haji yang Profesional | 40 | Orang | 7.172.000 |
| 051 | Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji | | | 6.572.000 |
| 052 | Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji | | | 600.000 |
| 2148.QDC.002 | Jemaah Haji Reguler yang Terbina | 955 | Orang | 1.320.000 |
| 051 | Bimbingan Jemaah Haji Reguler | | | 1.320.000 |
| 025.09.WA | **Program Dukungan Manajemen** | | | 152.132.000 |
| **2150** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah** | | | 152.132.000 |
| ***2150.EBA*** | ***Layanan Dukungan Manajemen Internal*** | 3 | Layanan | 152.132.000 |
| 2150.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1 | Layanan | 700.000 |
| 053 | Penyebaran Informasi Haji dan Umrah | | | 700.000 |
| 2150.EBA.962 | Layanan Umum | 1 | Layanan | 6.432.000 |
| 052 | Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji | | | 6.432.000 |
| 2150.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 145.000.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 145.000.000 |

# BAB III
# RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA

Rencana Aksi merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus pada kegiatan prioritas sebagai acuan lembaga dan pemerintah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Rencana Aksi disusun dengan menyelaraskan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen, Sub Komponen, Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab.

## *A. Cascading* Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran.

Terdapat 74 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang tersebar pada Bidang Agama, Bidang Pendidikan Dasar Menengah, dan Bidang Tata Kelola

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00

   Indikator Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK) merupakan ukuran tingkat kerukunan umat beragama di tingkat provinsi yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui survei nasional. IKSK mengukur tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.

   Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 83 dengan harapan Capaian ini dapat menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di wilayah provinsi berada dalam kategori baik dan stabil sesuai dengan target yang direncanakan.

   untuk mencapai indikator tersebut maka perlu adanya berbagai program dan kegiatan, antara lain:

   1) Fasilitas dialog dan koordinasi lintas agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian potensi permasalahan keagamaan secara musyawarah.
   2) Penguatan moderasi beragama melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan penyuluh agama, dan edukasi kepada masyarakat.
   3) Deteksi dini dan mitigasi potensi konflik sosial keagamaan melalui koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.

4) Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas antar umat beragama.

2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

Indikator Persentase Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS) merupakan bagian dari upaya strategis dalam menjaga dan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK). Implementasi EWS di KUA direncanakan untuk mendeteksi secara dini potensi konflik sosial keagamaan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan respons cepat terhadap dinamika kehidupan beragama di tingkat kecamatan.

Pada Tahun Anggaran yang direncanakan, target Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS ditetapkan sebesar 16,9% dari total KUA yang ada. Berdasarkan rencana kerja yang disusun, pelaksanaan indikator ini diproyeksikan dapat memenuhi target tersebut guna mencapai tingkat kinerja 100% pada akhir tahun anggaran.

Perencanaan program penguatan deteksi dini melalui EWS ini akan dijalankan sesuai dengan tahapan kerja yang sistematis. Keberhasilan target tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa langkah strategis yang telah diprogramkan, antara lain:

1) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penghulu dan penyuluh agama terkait mekanisme EWS.
2) Penguatan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta pemerintah daerah.
3) Penyelenggaraan monitoring dan pelaporan berkala terkait potensi gangguan kerukunan umat beragama.
4) Optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempercepat alur informasi.

Dengan penetapan target indikator ini, diharapkan fungsi KUA sebagai garda terdepan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama dapat berjalan optimal, serta mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama secara berkelanjutan.

3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Indikator Persentase Peningkatan Dialog Kerukunan yang Difasilitasi untuk Merumuskan Rekomendasi Early Warning System (EWS) merupakan salah

satu instrumen strategis dalam mendukung penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK). Dialog kerukunan dirancang sebagai sarana partisipatif untuk mempertemukan tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengidentifikasi potensi kerawanan serta merumuskan rekomendasi deteksi dini yang komprehensif dan responsif. Pada Tahun Anggaran ini, target indikator ditetapkan sebesar 79,49%. Berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun, seluruh rangkaian kegiatan diarahkan untuk mencapai target tersebut secara optimal guna memastikan tingkat capaian kinerja memenuhi parameter yang telah ditentukan.

Pelaksanaan fasilitasi dialog kerukunan ini direncanakan agar terlaksana sesuai dengan jadwal kerja dan diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam:

1) Meningkatkan intensitas komunikasi lintas agama dan lintas sektor.
2) Menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan penguatan mekanisme EWS.
3) Mendorong sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
4) Memperkuat peran deteksi dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan.

Upaya pemenuhan target ini akan didukung melalui pelaksanaan kegiatan dialog secara terstruktur, penyusunan notulen dan rekomendasi tertulis, serta pengintegrasian tindak lanjut hasil dialog ke dalam sistem pelaporan dan pemantauan EWS.

Dengan target indikator yang ditetapkan secara optimal ini, diharapkan kualitas rekomendasi EWS menjadi semakin akurat dan implementatif, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan nilai IKSK secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun berjalan, peningkatan kualitas dialog akan terus diupayakan melalui perluasan partisipasi, penguatan kapasitas moderator dan fasilitator, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan pelaporan hasil dialog.

4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai audiens dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparawi), Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesparani), Utsawa Dharma Gita, dan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 83,33%. Berdasarkan perencanaan kinerja yang disusun, pelaksanaan program diarahkan untuk mencapai target tersebut secara penuh guna memastikan tingkat capaian kinerja memenuhi parameter yang telah ditentukan.

Target ini direncanakan melalui strategi peningkatan publikasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta optimalisasi media informasi dan pelibatan komunitas keagamaan agar berjalan efektif. Peningkatan audiens diharapkan tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan secara teknis, tetapi juga menunjukkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan keagamaan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

Pencapaian target indikator ini nantinya akan didukung oleh beberapa langkah strategis yang telah diprogramkan, antara lain:

1) Intensifikasi sosialisasi kegiatan melalui media sosial dan jejaring komunitas.
2) Sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.
3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan acara sehingga mampu menarik minat masyarakat secara luas.
4) Penyediaan akses informasi dan fasilitas yang lebih baik bagi pengunjung.

Dengan tercapainya target IKSK ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator peningkatan audiens kegiatan keagamaan berada pada kategori sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan akan terus dilakukan guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam

   Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan jumlah peserta dalam penyelenggaraan event seni budaya agama Islam, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), festival hadrah, lomba kaligrafi, dan kegiatan seni Islami

lainnya. Peningkatan jumlah peserta diharapkan mampu mencerminkan keberhasilan pembinaan, pengembangan minat dan bakat, serta efektivitas sosialisasi program kepada masyarakat.

Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan adalah sebesar 3,52%. Berdasarkan perencanaan kinerja yang disusun, pelaksanaan program diarahkan untuk mencapai target tersebut secara optimal guna memastikan strategi pembinaan dan promosi kegiatan seni budaya Islam berjalan sesuai dengan peta jalan yang telah direncanakan.

Upaya pencapaian target indikator ini akan didukung oleh beberapa langkah strategis yang telah diprogramkan, antara lain:

1) Peningkatan koordinasi dengan lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi keagamaan.
2) Intensifikasi publikasi dan sosialisasi melalui media sosial dan jejaring komunitas.
3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan yang lebih menarik dan inklusif.
4) Dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembinaan peserta.

Dengan penetapan target IKSK ini, kinerja pada indikator peningkatan peserta event seni budaya agama Islam diproyeksikan dapat terlaksana dengan kategori sangat baik. Sepanjang tahun mendatang, upaya inovasi program, perluasan jangkauan peserta, serta penguatan pembinaan berkelanjutan akan terus dilakukan guna menjaga tren peningkatan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan kegiatan seni budaya Islam.

6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

   Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pendampingan dan pembinaan tata kelola kelembagaan terhadap lembaga agama dan sosial keagamaan. Pendampingan akan difokuskan pada penguatan aspek administrasi, manajemen organisasi, akuntabilitas keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga yang menjadi sasaran meliputi organisasi dan yayasan keagamaan, rumah ibadah, serta lembaga sosial berbasis keagamaan.

Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan adalah sebesar 74,71%. Berdasarkan perencanaan kinerja yang disusun, pelaksanaan program diarahkan untuk mencapai target tersebut secara penuh guna memastikan tingkat capaian kinerja memenuhi parameter yang telah direncanakan dan jadwal yang ditetapkan.

Rencana pencapaian indikator ini akan didukung oleh beberapa langkah strategis yang telah diprogramkan, antara lain:

1) Penyusunan jadwal pendampingan yang sistematis dan terukur.
2) Koordinasi aktif dengan pengurus lembaga agama dan sosial keagamaan.
3) Penyediaan materi pembinaan yang aplikatif terkait manajemen organisasi dan pelaporan keuangan.
4) Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi hasil pembinaan.

Melalui pendampingan yang akan dilaksanakan, diharapkan lembaga agama dan sosial keagamaan menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan penetapan target IKSK ini, kinerja pada indikator tersebut diproyeksikan dapat dikategorikan sangat baik, dan akan terus dioptimalkan melalui penguatan sistem pembinaan berkelanjutan serta perluasan jangkauan layanan sepanjang periode berjalan.

**7. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penyuluh agama berdasarkan pemenuhan kewajiban laporan harian, produktivitas dan kualitas konten digital keagamaan, serta partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (kediklatan). Penilaian dilakukan secara terstruktur dan periodik sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penyuluh agama telah memenuhi standar kinerja dengan kategori baik, baik dalam aspek administrasi pelaporan, inovasi konten digital, maupun pengembangan kompetensi melalui kediklatan.

Capaian ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten dan berbasis indikator terukur.
2. Pembinaan rutin dan pendampingan teknis kepada penyuluh agama.
3. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyuluhan.
4. Peningkatan partisipasi penyuluh dalam program pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kompetensi.

Dengan tercapainya target IKSK ini secara penuh, kinerja penyuluh agama dalam mendukung program pembinaan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas akan difokuskan pada inovasi metode penyuluhan, peningkatan kualitas konten digital, serta penguatan kapasitas profesional guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja.

**8. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keseimbangan antara jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan layanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. Rasio ini dirancang untuk mencerminkan efektivitas distribusi tugas, pemerataan layanan, serta optimalisasi peran penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Pada tahun anggaran berjalan, target rasio ditetapkan sebesar 1:24, yang berarti satu orang penyuluh agama direncanakan membina 24 kelompok sasaran. Seluruh tahapan perencanaan penugasan dan distribusi wilayah binaan diarahkan agar berjalan secara proporsional sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, guna memastikan kelompok sasaran memperoleh akses layanan bimbingan secara optimal.

Upaya pencapaian target rasio ini akan didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1) Pemetaan kelompok sasaran secara akurat dan terstruktur.
2) Penetapan wilayah binaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat.
3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap beban kerja penyuluh agama.
4) Koordinasi aktif antara penyuluh dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan/desa.

.

9. **Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi**

   Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas dan kompetensi fasilitator dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan agama. Pada tahun anggaran ini, target ditetapkan sebesar 70,05%. Proses sertifikasi fasilitator direncanakan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan guna memenuhi standar kompetensi substansi materi maupun metodologi.
   Pencapaian target ini akan didukung oleh:
   1) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara terjadwal dan terstruktur.
   2) Koordinasi yang baik dengan lembaga penyelenggara sertifikasi dan narasumber kompeten.
   3) Komitmen fasilitator untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.

10. **Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat jangkauan program pembinaan pranikah kepada remaja usia sekolah sebagai bagian dari upaya preventif. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 0,5%. Pelaksanaan program direncanakan berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan penyusunan materi yang relevan bagi karakteristik remaja.

11. **Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga. Pada tahun anggaran berjalan, target peningkatan layanan ditetapkan sebesar 8,33%. Penyediaan layanan ini direncanakan mengalami peningkatan melalui optimalisasi peran penyuluh agama dan penambahan variasi bentuk layanan konsultatif kepada masyarakat.

12. **Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase masjid dan musholla yang memperoleh sertifikat penetapan arah kiblat. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 20%. Program pengukuran dan sertifikasi ini direncanakan berjalan melalui pemetaan rumah ibadah yang belum bersertifikat serta ketersediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang falakiyah.

13. **Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerbitan rekomendasi atas hasil pengawasan produk halal. Pada tahun anggaran berjalan, target

ditetapkan sebesar 0,84%. Proses pengawasan dan penerbitan rekomendasi direncanakan terlaksana sesuai standar operasional melalui pengawasan berbasis risiko dan koordinasi efektif dengan instansi terkait.

14. **Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat integrasi data calon penerima dana sosial keagamaan. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 0,5%. Proses pendataan, verifikasi, dan validasi direncanakan terlaksana sesuai mekanisme guna memastikan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan.

15. **Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota**

    ndikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kuota pemberangkatan calon jamaah lanjut usia (lansia). Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 5%. Proses verifikasi dan penetapan direncanakan sesuai dengan ketentuan guna memastikan prioritas layanan bagi jamaah lansia dapat terpenuhi secara tepat waktu.

16. **Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan PLHUT terhadap standar pelayanan. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 80,5%. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana direncanakan sesuai pedoman teknis untuk mendukung pelayanan yang transparan dan akuntabel.

17. **Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan PLHUT. Pada tahun anggaran berjalan, target tingkat kepuasan ditetapkan sebesar 86,5%. Upaya pencapaian target ini direncanakan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas serta peningkatan kompetensi petugas layanan.

18. **Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas petugas haji. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 81%. Pencapaian standar kinerja di atas 75 direncanakan melalui proses seleksi yang objektif serta pembekalan teknis sebelum pelaksanaan tugas operasional.

19. **Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji**

Indikator ini digunakan untuk mengukur partisipasi calon jemaah dalam bimbingan manasik. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 72%. Pelaksanaan bimbingan direncanakan terjadwal secara terstruktur agar mampu menjangkau calon jemaah sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

20. **Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas PIHK dan PPIU. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 82,05%. Proses akreditasi direncanakan berjalan secara objektif guna mendorong lembaga mencapai standar mutu tertinggi dalam manajemen dan pelayanan jamaah.

21. **Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur mutu lulusan pada satuan pendidikan keagamaan. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 0,5%. Mutu pembelajaran dan proses evaluasi direncanakan berjalan sesuai standar kompetensi lulusan melalui penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan.

22. **Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dimaksud. Pendidikan inklusif dirancang untuk memberikan akses layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa diskriminasi.

    Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 30,5%. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini direncanakan berjalan sesuai dengan program peningkatan akses pendidikan yang berkeadilan. Upaya pencapaian target akan didukung oleh:

    1) Sosialisasi kebijakan kepada pengelola satuan pendidikan.
    2) Peningkatan kapasitas pendidik dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
    3) Penyediaan sarana dan prasarana ramah inklusi.

23. **Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan layanan pendidikan dari jenjang PAUD ke pendidikan dasar. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 12,00%. Program sosialisasi dan penguatan transisi PAUD ke pendidikan dasar direncanakan berjalan sesuai dengan pemetaan kesiapan belajar anak. Pencapaian target ini akan didukung melalui koordinasi antara pengelola PAUD dan satuan pendidikan dasar serta monitoring pendataan peserta didik secara berkala

24. **Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelenggaraan layanan kesehatan sekolah (UKS, PHBS, dsb). Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 28,64%. Penyelenggaraan layanan ini direncanakan berjalan sesuai dengan kebijakan lingkungan belajar yang sehat. Langkah strategis yang diprogramkan meliputi kerja sama dengan instansi kesehatan setempat dan penyediaan sarana pendukung seperti ruang UKS.

25. **Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang memperoleh akses pendidikan kesetaraan di pesantren. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebanyak 2.619 anak. Program ini direncanakan untuk menjangkau sasaran melalui pendataan ATS yang akurat serta peran aktif pesantren dalam menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel.

26. **Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca; b. Numerasi**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian mutu hasil belajar pada aspek literasi dan numerasi. Pada tahun anggaran berjalan, target rata-rata nilai ditetapkan sebesar 90,25. Mutu pembelajaran direncanakan mengacu pada standar kompetensi dasar nasional. Upaya pencapaian target akan didukung oleh penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan berbasis asesmen, serta pemanfaatan data sebagai dasar perbaikan pembelajaran.

27. **Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan komunitas (komite, orang tua, tokoh masyarakat) dalam penyusunan RKT. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 92%. Penerapan prinsip tata kelola partisipatif ini direncanakan agar perencanaan program menjadi lebih responsif. Langkah pendukung meliputi penguatan kapasitas manajerial kepala satuan pendidikan dalam menyusun RKT secara kolaboratif.

28. **Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat implementasi pendidikan karakter (integritas, religiusitas, dsb) dalam pembelajaran. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 82,68%. Integrasi nilai karakter ini direncanakan terlaksana secara terstruktur melalui pendampingan kepada pendidik serta penciptaan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter peserta didik.

29. **Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian prestasi peserta didik di berbagai tingkatan. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebanyak 250 prestasi. Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler direncanakan berjalan secara intensif guna menghasilkan output yang terukur. Keberhasilan ini akan didukung oleh sinergi dengan orang tua serta penyediaan sarana pendukung bakat minat siswa.

30. **Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan nilai karakter (disiplin, gotong royong, dsb) melalui pramuka. Pada tahun anggaran berjalan, target ditetapkan sebesar 0,5%. Program pembinaan karakter ini direncanakan berjalan melalui latihan rutin dan kegiatan sosial yang terstruktur. Pencapaian target akan didukung oleh pembina pramuka yang kompeten serta evaluasi berkala terhadap perkembangan sikap siswa.

31. **Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat evaluasi dan pengembangan perangkat kurikulum dalam rangka memperkuat mutu pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Evaluasi dan pengembangan ini direncanakan mencakup penyempurnaan dokumen kurikulum, silabus, modul ajar, serta integrasi nilai-nilai toleransi dan kesadaran lingkungan.

Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 56%. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum direncanakan berjalan sesuai dengan rencana kerja guna memenuhi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Upaya pencapaian target ini akan didukung oleh:

1) Pelaksanaan reviu kurikulum secara berkala oleh tim pengembang.
2) Integrasi isu-isu kemanusiaan dan lingkungan dalam perencanaan pembelajaran.
3) Peningkatan kapasitas pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum berorientasi nilai.

**32. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu melalui capaian akreditasi minimal peringkat B. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 74,5%. Pelaksanaan program ini direncanakan agar sebagian besar satuan pendidikan dapat memenuhi standar mutu nasional. Langkah strategis yang diprogramkan meliputi pembinaan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta monitoring berkala terhadap kesiapan akreditasi.

**33. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi satuan pendidikan yang memenuhi kriteria unggul (akademik, tata kelola, dan inovasi). Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 0,98%. Penyelenggaraan satuan pendidikan unggul direncanakan berjalan sesuai dengan strategi pusat keunggulan (center of excellence). Pencapaian ini akan didukung melalui pembinaan intensif dan penguatan manajemen berbasis mutu.

**34. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi implementasi program bilingual guna meningkatkan daya saing global. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 1%. Implementasi program ini direncanakan berjalan melalui kesiapan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi bahasa asing serta penyusunan perangkat pembelajaran bilingual yang terstruktur.

35. **Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam ajang kompetisi akademik maupun nonakademik. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 0,3%. Program pembinaan dan fasilitasi keikutsertaan siswa direncanakan berjalan sesuai rencana guna mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Upaya ini akan didukung oleh identifikasi siswa berprestasi serta keterlibatan pelatih yang kompeten.

36. **Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur penerapan tata kelola madrasah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 65,8%. Sebagian besar madrasah direncanakan menerapkan prinsip kolaboratif melalui optimalisasi peran komite madrasah dan penguatan kapasitas manajerial kepala madrasah.

37. **Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran**

    Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan dan pemanfaatan materi ajar digital (modul, video, e-book). Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 51%. Digitalisasi materi ajar ini direncanakan melalui pengembangan modul digital oleh guru dan optimalisasi platform pembelajaran daring sebagai bagian dari transformasi teknologi pendidikan.

38. **Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi guru yang memiliki pengakuan profesional melalui sertifikasi. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 40%. Program fasilitasi dan pendampingan sertifikasi guru direncanakan berjalan melalui pemutakhiran data guru yang memenuhi syarat serta pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

39. **Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP**

Indikator ini digunakan untuk mengukur keseimbangan jumlah guru dan siswa sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pada tahun anggaran berjalan, target rasio ditetapkan sebesar 1:13. Distribusi dan ketersediaan guru direncanakan sesuai standar melalui pemetaan kebutuhan rombongan belajar dan penataan redistribusi guru secara proporsional.

40. **Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi tenaga administrasi, pustakawan, dan laboran yang memenuhi standar kualifikasi. Pada tahun anggaran berjalan, target yang ditetapkan sebesar 30%. Upaya peningkatan kualitas ini direncanakan berjalan melalui fasilitasi bimbingan teknis serta monitoring terhadap pemenuhan standar kompetensi tenaga kependidikan.

41. **Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik**

    Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi guru agama yang diproyeksikan memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan profesional atas kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Pada tahun anggaran ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 54,54%. Mengingat saat ini masih berada pada awal tahun pelaporan, serangkaian program fasilitasi dan pembinaan telah direncanakan secara terukur untuk memastikan target tersebut tercapai 100% di akhir tahun.

    1) Upaya strategis yang akan dilaksanakan antara lain:
    2) Pemutakhiran data guru agama yang memenuhi syarat sertifikasi.
    3) Fasilitasi administrasi dan koordinasi intensif dengan lembaga penyelenggara.
    4) Penyelenggaraan workshop dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
    5) Monitoring berkala terhadap progres tahapan sertifikasi.

42. **Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil**

    Indikator ini memetakan kompetensi guru melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG) sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk tahun ini, target ditetapkan sebesar 42%. Program peningkatan kompetensi telah disusun untuk memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya pendidik sejak awal tahun anggaran.

Langkah strategis yang disiapkan meliputi:

1) Pembinaan dan pendampingan intensif persiapan AKG.
2) Pelatihan khusus kompetensi pedagogik dan profesional.
3) Pemanfaatan data awal untuk penyusunan program pengembangan profesi.
4) Evaluasi rutin terhadap kesiapan guru menghadapi asesmen.

43. **Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil**

Indikator ini bertujuan memastikan Kepala Madrasah memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang optimal. Target yang ditetapkan tahun ini adalah sebesar 82%. Perencanaan kegiatan difokuskan pada penguatan fungsi kepemimpinan agar mampu mengelola satuan pendidikan secara akuntabel.

Langkah strategis yang akan diambil:

1) Penguatan kompetensi manajerial melalui pembinaan terpadu.
2) Pelatihan kepemimpinan dan supervisi akademik.
3) Pendampingan implementasi manajemen berbasis madrasah.

44. **Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik**

Indikator ini mengukur kesiapan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas. Target tahun ini ditetapkan sebesar 51,2%. Di awal tahun ini, komitmen organisasi difokuskan pada pembangunan karakter moderat di lingkungan pendidikan.

Faktor pendukung yang akan dioptimalkan:

1) Workshop penguatan sikap toleransi dan inklusif.
2) Sosialisasi kriteria asesmen moderasi beragama yang objektif.
3) Penyediaan modul dan panduan belajar moderasi beragama.

45. **Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil**

Indikator ini mencerminkan kualitas fungsi pengawasan dan pembinaan di madrasah dengan target sebesar 87%. Program pengembangan kompetensi pengawas telah dijadwalkan untuk memastikan standar pengawasan pendidikan terpenuhi.

Upaya yang akan dilakukan:

1) Bimbingan teknis peningkatan kemampuan supervisi dan evaluasi.
2) Penyediaan sumber belajar relevan bagi pengawas madrasah.
3) Monitoring kesiapan pengawas dalam menghadapi AKP.

**46. Persentase guru yang meningkat jenjang karir**

Indikator ini mengukur efektivitas pengembangan profesional melalui kenaikan jabatan fungsional dengan target sebesar 0,15%. Di awal tahun, fokus utama adalah pemetaan kesiapan administrasi dan kinerja guru.

Strategi yang akan dijalankan:

1) Sosialisasi panduan resmi kenaikan jenjang karir berbasis kinerja.
2) Evaluasi kinerja rutin sebagai dasar rekomendasi promosi.
3) Supervisi terhadap pemenuhan kriteria angka kredit guru.

**47. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir**

Target peningkatan jenjang karir pengawas pada tahun ini ditetapkan sebesar 0,69%. Upaya ini mencerminkan komitmen organisasi dalam pembinaan ASN yang transparan dan berbasis prestasi.

Faktor pendukung yang disiapkan:

1) Pelatihan dan bimbingan teknis profesionalisme pengawas.
2) Dukungan pimpinan dalam proses usulan kenaikan jenjang.
3) Pemantauan progres karir secara berkelanjutan.

**48. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Indikator ini mengukur proyeksi peningkatan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target sebesar 89% dibandingkan periode sebelumnya. Perencanaan telah disusun untuk memperkuat kompetensi guru secara merata.

Langkah strategis yang direncanakan:

1) Sinkronisasi kurikulum dan alokasi sumber daya PPG.
2) Sinergi dengan perguruan tinggi penyelenggara.
3) Fasilitasi dukungan administrasi bagi peserta PPG.

**49. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan**

Indikator ini mengukur penerbitan rekomendasi pengadaan guru berbasis kebutuhan dengan target sebesar 37,3%. Di awal tahun, fokus terletak pada keterpaduan data kebutuhan guru di seluruh satuan kerja.

Rencana pelaksanaan:

1) Analisis rencana kebutuhan guru agama secara komprehensif.
2) Koordinasi antarunit untuk penerbitan rekomendasi yang tepat sasaran.

**50. Nilai Kinerja Anggaran**

Sebagai tolok ukur efisiensi, target nilai kinerja anggaran ditetapkan sebesar 92,8. Di awal tahun ini, penekanan dilakukan pada perencanaan yang matang agar penyerapan anggaran nantinya tepat sasaran dan akuntabel.

Langkah pengendalian yang disiapkan:

1) Penyusunan rencana penarikan dana yang presisi berbasis output.
2) Penerapan disiplin prosedur pengelolaan keuangan sejak triwulan pertama.
3) Penguatan tim pengelola keuangan dalam pelaporan yang akurat.

**51. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun laporan kinerja sesuai standar yang berlaku. Pada tahun anggaran ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 60%. Di awal tahun ini, fokus organisasi diarahkan pada pemantapan struktur dan format laporan agar mencakup capaian program serta realisasi anggaran secara akurat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Upaya strategis yang disiapkan antara lain:

1) Sosialisasi regulasi, format, dan prosedur standar penyusunan laporan.
2) Persiapan sistem informasi kinerja untuk validasi data secara tepat waktu.
3) Penguatan koordinasi antarunit dalam penyediaan data kinerja.

**52. Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75**

Indikator ini mengukur komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang transparan. Untuk tahun berjalan, target nilai pembangunan ZI ditetapkan sebesar 1,25. Perencanaan awal tahun difokuskan pada penguatan budaya kerja akuntabel dan pencegahan korupsi di lingkungan satuan kerja.

Langkah strategis yang akan diambil:

1) Penguatan dukungan pimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip ZI.
2) Penyusunan jadwal pemantauan rutin terhadap pemenuhan dokumen pendukung ZI.
3) Sosialisasi SOP dan panduan penerapan prinsip integritas di setiap unit.

**53. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Target IKPA tahun ini ditetapkan sebesar 95. Di awal periode ini, manajemen

perencanaan dan penyerapan anggaran telah disusun agar berjalan tepat sasaran sesuai dengan regulasi keuangan yang berlaku.

Faktor pendukung yang akan dioptimalkan:

1) Sinkronisasi anggaran dengan target kinerja yang jelas dan prioritas program.
2) Penyiapan jadwal pemantauan realisasi anggaran secara berkala.
3) Peningkatan disiplin tim keuangan dalam penerapan prosedur pengelolaan kas.

**54. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan**

Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal. Target penyelesaian tahun ini ditetapkan sebesar 50%. Upaya awal tahun difokuskan pada pemetaan temuan dan penyusunan jadwal penyelesaian tindak lanjut secara tepat waktu.

Langkah strategis yang direncanakan:

1) Pendokumentasian prosedur dan jadwal penyelesaian tindak lanjut.
2) Pemanfaatan sistem informasi monitoring untuk melacak progres penyelesaian temuan.
3) Penguatan kolaborasi antarunit terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi.

**55. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Target tahun ini ditetapkan sebesar 100%. Perencanaan diarahkan pada kesiapan tim keuangan dalam menyusun laporan yang akurat pada setiap akhir semester.

Upaya yang akan dilakukan:

1) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan data keuangan secara real-time.
2) Pemantauan progres penyusunan laporan sejak awal periode untuk memastikan ketepatan waktu.
3) Penguatan kompetensi tim akuntansi terkait regulasi pelaporan terbaru.

**56. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Penerapan PIPK bertujuan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan dengan target sebesar 100%. Di awal tahun, fokus utama adalah

memastikan seluruh unit kerja memahami prosedur pengendalian internal untuk mencegah risiko penyimpangan.

Strategi yang akan dijalankan:

1) Penyediaan pedoman dan prosedur PIPK yang mudah dipahami oleh satuan kerja.
2) Pelaksanaan supervisi internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan standar.
3) Penguatan peran pimpinan dalam menegakkan akuntabilitas laporan keuangan.

**57. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu**

Indikator ini mengukur disiplin perencanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan target sebesar 75%. Upaya awal tahun diarahkan pada koordinasi antarunit guna memastikan usulan kebutuhan aset sesuai dengan kebutuhan nyata dan jadwal yang ditetapkan.

Langkah strategis yang disiapkan:

1) Sosialisasi standar penyusunan RKBMN kepada seluruh unit kerja.
2) Penggunaan sistem pengingat jadwal penyusunan agar tidak melampaui batas waktu.
3) Validasi data sarana dan prasarana sebagai dasar perencanaan kebutuhan.

**58. Indeks Profesionalisme ASN**

Indikator ini mengukur kompetensi, disiplin, dan etika kerja ASN dengan target indeks sebesar 63,4. Di awal tahun, organisasi berkomitmen memperkuat program pengembangan SDM guna mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Faktor pendukung yang akan dijalankan:

1) Perencanaan program pengembangan kompetensi dan pelatihan ASN.
2) Penguatan sistem manajemen kinerja yang transparan dan terukur.
3) Internalisasi budaya kerja profesional melalui pembinaan rutin.

**59. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan**

Indikator ini mencerminkan kesiapan dalam merencanakan SDM berbasis kebutuhan organisasi dengan target sebesar 65%. Perencanaan tahun ini

difokuskan pada ketersediaan data SDM yang akurat untuk mendukung operasional kerja.

Rencana pelaksanaan:

1) Analisis beban kerja dan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap unit.
2) Koordinasi intensif antarunit dalam penyusunan rencana pengadaan SDM.
3) Sinkronisasi rencana pengadaan dengan regulasi kepegawaian yang berlaku.

**60. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif**

Penghargaan ini bertujuan mendorong budaya kinerja kompetitif dan produktif dengan target sebanyak 15 orang. Di awal tahun, kriteria penilaian dan mekanisme seleksi telah disiapkan agar proses apresiasi berjalan objektif.

Langkah-langkah yang akan ditempuh:

1) Penetapan kriteria penilaian pegawai teladan yang jelas dan terukur.
2) Sosialisasi mekanisme penghargaan untuk memotivasi ASN.
3) Monitoring kinerja rutin sebagai dasar proses seleksi dan verifikasi.

**61. Persentase kasus hukum yang terselesaikan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur target penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh organisasi, baik internal maupun pelayanan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran ini, target penyelesaian kasus hukum ditetapkan sebesar 100%. Di awal tahun ini, sistem manajemen hukum dan prosedur penanganan telah disiapkan untuk memastikan seluruh permasalahan hukum dapat ditangani secara tepat waktu dan akuntabel.

Upaya yang akan dilakukan meliputi:

1) Penguatan koordinasi antarunit terkait dalam penanganan kasus.
2) Ketepatan penerapan regulasi hukum dalam setiap tahapan penyelesaian.
3) Monitoring rutin untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang akuntabel.

**62. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses**

Indikator ini bertujuan mengukur target digitalisasi arsip dan kemudahan akses bagi pengguna. Untuk tahun berjalan, target indikator ditetapkan sebesar 72%. Perencanaan awal tahun difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan dokumen organisasi.

Faktor pendukung yang akan dioptimalkan:

1) Pengembangan sistem manajemen arsip elektronik yang terintegrasi.
2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan arsip digital.
3) Pemeliharaan infrastruktur TIK untuk menjamin keamanan dan kecepatan akses data.

**63. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap**

Indikator ini digunakan untuk memastikan pengembangan infrastruktur organisasi berjalan sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Target indikator tahun ini sebesar 64%. Di awal tahun, manajemen telah menyusun jadwal pembangunan yang terstruktur agar selaras dengan kebutuhan operasional dan pelayanan publik.

Langkah strategis yang disiapkan antara lain:

1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan roadmap jangka menengah.
2) Pengelolaan anggaran yang efisien untuk pengembangan sarana prasarana.
3) Pengawasan berkala terhadap setiap tahapan progres pembangunan.

**64. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID**

Indikator ini mengukur proyeksi kematangan penyelenggaraan PPID dalam menyediakan layanan informasi publik. Target indikator ditetapkan pada nilai 95. Pada awal periode ini, komitmen organisasi diarahkan pada pemantapan mekanisme layanan permohonan informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Upaya penguatan yang direncanakan:

1) Standardisasi sistem layanan informasi publik yang jelas.
2) Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan dokumentasi.
3) Pemutakhiran prosedur layanan informasi sesuai regulasi keterbukaan informasi.

**65. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi**

Indikator ini digunakan untuk mengukur target peningkatan publikasi konten edukatif melalui berbagai platform media. Target peningkatan ditetapkan sebesar 11%. Di awal tahun, strategi komunikasi telah disusun untuk

memperluas akses masyarakat terhadap konten keagamaan dan pendidikan yang berkualitas.

Langkah strategis yang akan diambil:

1) Perencanaan produksi konten berbasis kebutuhan dan tren masyarakat.
2) Kolaborasi antarunit untuk pengumpulan materi edukatif.
3) Optimalisasi media digital dan sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

**66. Indeks Pembangunan Statistik**

Indikator ini mengukur target kematangan penyelenggaraan statistik sektoral melalui tata kelola data yang berkualitas. Target Indeks Pembangunan Statistik ditetapkan sebesar 2,72. Perencanaan awal tahun difokuskan pada pemantapan proses bisnis statistik agar menghasilkan data yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor pendukung yang disiapkan:

1) Penguatan koordinasi antarunit statistik.
2) Penerapan standar kualitas data dan metodologi statistik yang tepat.
3) Pengembangan infrastruktur sistem informasi statistik yang memadai.

**67. Persentase data statistik yang dipublikasi**

Indikator ini mengukur target persentase data statistik yang akan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dengan target sebesar 10%. Di awal tahun, proses pengumpulan dan pengolahan data telah dijadwalkan guna mendukung transparansi dan penyediaan dasar perumusan kebijakan yang akurat.

Langkah-langkah yang akan ditempuh:

1) Penyiapan data yang valid, lengkap, dan terstruktur.
2) Pengembangan sistem publikasi yang mudah diakses oleh publik.
3) Pemutakhiran data secara berkala guna memastikan relevansi informasi.

**68. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output**

Indikator ini bertujuan memastikan keselarasan antara penggunaan anggaran dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Di awal tahun anggaran, sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan target kinerja telah dilakukan untuk menjaga akuntabilitas berbasis kinerja.

Upaya pengendalian yang disiapkan:

1) Monitoring realisasi anggaran yang ketat terhadap progres fisik kegiatan.
2) Penyediaan data kinerja secara real-time untuk pengambilan keputusan.
3) Efisiensi belanja guna memastikan kontribusi maksimal terhadap sasaran strategis.

**69. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama**

Indikator ini mengukur target peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan proyeksi peningkatan sebesar 1,67%. Perencanaan awal tahun diarahkan pada perbaikan tata kelola dan efektivitas program guna mencapai sasaran strategis kementerian.

Strategi penguatan kinerja meliputi:

1) Penguatan sistem manajemen kinerja dan monitoring rutin.
2) Komitmen pimpinan dalam menjaga kualitas layanan publik.
3) Evaluasi berkala untuk perbaikan proses dan prosedur kerja antarunit.

**70. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media**

Indikator ini mengukur target diseminasi kebijakan prioritas melalui berbagai kanal media dengan target sebesar 11%. Di awal periode ini, strategi komunikasi publik telah disiapkan untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.

Langkah strategis yang direncanakan:

1) Koordinasi intensif antarunit terkait kebijakan dan tim publikasi.
2) Penyiapan konten kebijakan yang siap disebarluaskan sesuai jadwal prioritas.
3) Optimalisasi pemanfaatan platform media digital guna memperluas jangkauan informasi.

**71. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media**

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur target tingkat peningkatan akses masyarakat terhadap informasi serta kualitas publikasi program dan kebijakan prioritas di bidang pendidikan melalui berbagai media komunikasi. Indikator ini merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi dan penguatan diseminasi kebijakan sejak awal tahun anggaran.

Pada tahun pelaporan ini, target peningkatan ditetapkan sebesar 11%. Mengingat saat ini merupakan awal tahun, strategi komunikasi publik telah disusun secara terarah untuk memastikan informasi program dan kebijakan prioritas bidang pendidikan dapat diakses secara luas dan akurat oleh masyarakat hingga akhir periode.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan antara lain:

1) Penerapan strategi komunikasi publik yang jelas dan terarah sejak dini.
2) Optimalisasi pemanfaatan berbagai kanal media (cetak, elektronik, digital).
3) Penguatan tim humas/komunikasi agar lebih kreatif dan responsif dalam memproduksi konten.

**72. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK**

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur target tingkat pemenuhan infrastruktur TIK guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi. Infrastruktur yang direncanakan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem pendukung lainnya agar layanan TIK berjalan secara optimal.

Untuk tahun anggaran ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Di awal tahun ini, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan telah disiapkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung proses bisnis dan efisiensi kerja organisasi secara berkelanjutan.

Faktor pendukung yang akan dioptimalkan:

1) Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis roadmap TIK.
2) Pengelolaan dukungan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.
3) Peningkatan kesiapan sumber daya manusia yang memahami operasional TIK.

**73. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra**

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur target tingkat ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini menjadi dasar penting dalam memastikan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi didukung oleh data yang akurat dan relevan.

Pada periode ini, target IKSK ditetapkan sebesar 90%. Langkah-langkah awal tahun difokuskan pada penguatan tata kelola data dan sinkronisasi indikator guna mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel dan berbasis bukti (evidence-based planning).

Langkah strategis yang direncanakan antara lain:

1) Integrasi sistem informasi dan pemutakhiran basis data prioritas.
2) Sinkronisasi indikator kegiatan dengan dokumen perencanaan nasional dan instansi.
3) Penguatan koordinasi tim data dalam proses pengumpulan dan validasi data secara berkala.

**74. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur target kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek perencanaan, kepatuhan regulasi, serta efisiensi pemanfaatan anggaran.

Pada tahun anggaran berjalan ini, target IKSK ditetapkan sebesar 92,84. Di awal tahun, fokus organisasi adalah memastikan perencanaan anggaran yang matang dan pengendalian internal yang ketat agar pengelolaan keuangan negara tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pencapaian target yang akan dilakukan:

1) Pengawalan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja sejak triwulan pertama.
2) Pengaktifan sistem monitoring dan evaluasi anggaran yang terstruktur.
3) Penguatan koordinasi antarunit kerja untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

**75. Target Nilai Kinerja Anggaran dan Struktur Penganggaran**

Dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, telah ditetapkan bahwa Target Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 92,84. Pencapaian nilai kinerja ini akan berkaitan erat dengan rencana realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta ketertiban pelaporannya sepanjang tahun berjalan.

Mengingat saat ini merupakan awal tahun anggaran, fokus utama organisasi adalah memastikan setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal dan didukung dengan sistem pelaporan yang disiplin. Organisasi menyadari

bahwa meskipun kegiatan dan anggaran nantinya dilaksanakan, kelalaian dalam proses pelaporan akan berdampak pada Nilai Kinerja Anggaran yang tidak optimal. Oleh karena itu, pada tahap awal ini, penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pelaksanaan fisik dengan administrasi pelaporan menjadi prioritas untuk menjamin tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

**76. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV.**

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang di tetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satun kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang di tuangkan dalam Halaman III DIPA.

Rencana Penarikan Dana ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksana kegiatan dan pelaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik.

# BAB IV
# PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini disusun dengan seksama serta senantiasa memperhatikan ketentuan dan regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dan acuan bagi setiap unit kerja, termasuk Satuan Kerja Madrasah Negeri di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan yang dinamis, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini tetap memungkinkan adanya penyesuaian, perbaikan, maupun perubahan. Hal tersebut dilakukan guna menyelaraskan dengan dinamika perubahan kebijakan pada unit kerja tingkat pusat/wilayah serta perkembangan lingkungan strategis di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep demi tercapainya target yang lebih optimal.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder internal terkait, mulai dari Kasubbag TU, para Kasi, Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Penzawa), hingga seluruh jajaran staf yang telah memberikan dedikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan penyusunan dokumen ini. Komitmen bersama sejak awal tahun ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi landasan kokoh bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan keagamaan dan pendidikan yang jauh lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep




Abdul Wasid

**Lampiran I :**
Perjanjian Kinerja Kantor Kementeruan Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WASID
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKHMAD SRUJI BAHTIAR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 2 Desember 2025

Pihak Kedua,

AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Pihak Pertama,

ABDUL WASID

Lampiran Perjanjian Kinerja :
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIDANG AGAMA** | | | | | |
| 1 | Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama | a. | Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 | Nilai | 83 |
| | | b. | Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS | Persen | 16,90 |
| | | c. | Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS | Persen | 79,49 |
| | | d. | Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha | Persen | 83,33 |
| | | e. | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam | Persen | 3,52 |
| | | f. | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 74,71 |
| 2 | Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak | a. | Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 100,00 |
| | | b. | Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama | Rasio | 1:24 |
| | | c. | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi | Persen | 70,05 |
| | | d. | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah | Persen | 0,50 |
| | | e. | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan | Persen | 8,33 |
| | | f | Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat | Persen | 20,00 |
| | | g | Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan | Persen | 0,84 |
| | | h | Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional | Persen | 0,50 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji | a | Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | Persen | 5,00 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | a | Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan | Persen | 80,50 |
| | | b | Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu | Nilai | 86,50 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | a | Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | Persen | 81,00 |
| | | b | Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | Persen | 72,00 |
| 6 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji | a | Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); | Persen | 82,05 |
| **BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH** | | | | | |
| 7 | Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan | a. | Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik | Persen | 0,50 |
| 8 | Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas | a. | Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Persen | 30,50 |
| | | b. | Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama | Persen | 12,,00 |
| | | | Widyalaya/Nava Dhammasekha) | | |
| | | c. | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Persen | 28,64 |
| | | d. | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | Jumlah | 2.619 |
| 9 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan | a. | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: | | 90,25 |
| | | | a. Literasi membaca | | |
| | | | b. Numerasi | | 93,82 |
| | | b. | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Persen | 92,00 |
| | | c. | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | 82,68 |
| | | d. | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Jumlah | 250 |
| | | e. | Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | 0,50 |
| | | f. | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | 56,00 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | g. | Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | Persen | 74,50 |
| | | h. | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara | Persen | 0,98 |
| | | i. | Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | 1,00 |
| | | j. | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 0,30 |
| | | k. | Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | 65,80 |
| | | l. | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Persen | 51,00 |
| 10 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan | a. | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 40,00 |
| | | b. | Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | 1:13 |
| | | c. | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | 30,00 |
| | | d. | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 54,54 |
| | | e. | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | 42,00 |
| | | f. | Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | 82,00 |
| | | g. | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | 51,17 |
| | | h. | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil | Persen | 87,00 |
| | | i. | Persentase guru yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,15 |
| | | j. | Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,69 |
| | | k | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Persen | 89,00 |
| | | l. | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | 37,30 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIDANG TATA KELOLA** | | | | | |
| 11 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | a. | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | 92,84 |
| 12 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | a. | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Persen | 60,00 |
| | | b. | Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75 | Nilai | 1,25 |
| 13 | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN | a. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 95,00 |
| | | b. | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Persen | 50,00 |
| | | c. | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Persen | 100,00 |
| | | d. | Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | Persen | 100,00 |
| | | e. | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 75,00 |
| 14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | a. | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 63,35 |
| | | b. | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | 65,00 |
| | | c. | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Jumlah | 15 |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum | a. | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | 100,00 |
| 16 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | a. | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Persen | 72,00 |
| | | b. | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | 64,00 |
| 17 | Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi | a. | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Tingkat | 95,00 |
| | | b. | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Persen | 11,00 |
| 18 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | a. | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,72 |
| | | b. | Persentase data statistik yang dipublikasi | Persen | 10,00 |
| 19 | Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan | a. | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | Persen | 90,00 |
| | | b. | Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama | Persen | 1,67 |
| | | c. | Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Persen | 11,00 |
| | | d. | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang | Persen | 11,00 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | pendidikan yang disampaikan melalui media | | |
| | | e. | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | Persen | 90,00 |
| | | f. | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Persen | 90,00 |
| | | g. | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 92,84 |

**Anggaran Se-Kabupaten Th. 2025**

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN 2025 |
|---|---|---|
| | | |
| **025** | **KEMENTERIAN AGAMA** | |
| | | |
| 025.01 | Sekretariat Jenderal | 112.958.358.000 |
| 025.01.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | 50.000.000 |
| 5620 | Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | 50.000.000 |
| 025.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 112.908.358.000 |
| 2098 | Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN | 3.405.000 |
| 2099 | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 3.405.000 |
| 2100 | Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN | 18.654.508.000 |
| 2101 | Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana | 3.405.000 |
| 2102 | Pembinaan Administrasi Perencanaan | 6.810.000 |
| 2103 | Pembinaan Administrasi Umum | 595.364.000 |
| 2106 | Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | 3.405.000 |
| 6708 | Dukungan Manajemen Pendidikan | 93.638.056.000 |
| 025.03 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam | 5.723.320.000 |
| 025.03.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | 3.924.414.000 |
| 2104 | Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah | 2.991.364.000 |
| 2122 | Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf | 27.040.000 |
| 2123 | Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam | 863.585.000 |
| 2124 | Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah | 42.425.000 |
| 025.03.WA | Program Dukungan Manajemen | 1.798.906.000 |
| 2125 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | 1.714.906.000 |
| 025.04 | Ditjen Pendidikan Islam | 6.965.750.000 |
| 025.04.DF | Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun | 5.785.990.000 |
| 2129 | Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah | 5.785.990.000 |
| 025.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 1.179.760.000 |
| 2135 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | 1.179.760.000 |
| 025.09 | Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 177.612.000 |
| 025.09.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | 25.480.000 |
| 2126 | Pembinaan Umrah dan Haji Khusus | 1.320.000 |
| 2147 | Pelayanan Haji Dalam Negeri | 15.668.000 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN 2025 |
|---|---|---|
| | | |
| 2148 | Pembinaan Haji | 8.492.000 |
| 025.09.WA | Program Dukungan Manajemen | 152.132.000 |
| 2150 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 152.132.000 |

Sidoarjo, 17 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep

ABDUL WASID

**Lampiran II:** Matrik Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2025

# RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN RENCANA TRIWULAN TAHUN 2025

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Sasaran Program/Kegiatan | | Target | | Realisasi | | Capaian Kinerja (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kinerja | Anggaran (Rp) | Kinerja | Anggaran (Rp) | | |
| 1 | Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama | 1 | Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 | 83 | Rp5.000.000 | | | | |
| | | 2 | Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS | 16,90% | Rp13.225.000 | | | | |
| | | 3 | Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS | 79,49% | | | | | |
| | | 4 | Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha | 83,33% | | | | | |
| | | 5 | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam | 3,52% | Rp110.210.000 | | | | |
| | | 6 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | 74,71% | | | | | |
| 2 | Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak | 7 | Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | 100% | | | | | |
| | | 8 | Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama | 01:24 | Rp783.375.000 | | | | |
| | | 9 | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi | 70,05% | | | | | |
| | | 10 | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah | 0,50% | Rp3.837.977.400 | | | | |
| | | 11 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan | 8,33% | | | | | |
| | | 12 | Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat | 20% | Rp3.075.000 | | | | |
| | | 13 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan | 0,84% | | | | | |
| | | 14 | Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional | 0,50% | Rp25.990.000 | | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji | 15 | Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | 5% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | 16 | Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan | 80,50% | Rp145.700.000 | | | | |
| | | 17 | Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu | 86,5 | Rp23.420.000 | | | | |
| 5 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | 18 | Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | 81% | Rp7.172.000 | | | | |
| | | 19 | Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | 72% | Rp1.320.000 | | | | |
| 6 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji | 20 | Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); | 82,05% | | | | | |
| 7 | Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan | 21 | Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik | 0,50% | Rp326.895.000 | | | | |
| 8 | Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas | 22 | Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 30,50% | | | | | |
| | | 23 | Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha) | 12,00% | | | | | |
| | | 24 | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | 28,64% | | | | | |
| | | 25 | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | 2619 | | | | | |
| 9 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan | 26 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:<br>a. Literasi membaca<br>b. Numerasi | 90,25 | Rp52.045.000 | | | | |
| | | 27 | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | 92% | | | | | |
| | | 28 | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 82,68% | | | | | |
| | | 29 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | 250 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 | Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | 0,50% | | | | | |
| | | 31 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | 56% | | | | | |
| | | 32 | Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | 74,50% | | | | | |
| | | 33 | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara | 0,98% | | | | | |
| | | 34 | Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual | 1% | | | | | |
| | | 35 | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 0,30% | | | | | |
| | | 36 | Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | 65,80% | | | | | |
| | | 37 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | 51% | | | | | |
| 10 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan | 38 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | 40% | Rp46.150.000 | | | | |
| | | 39 | Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP | 01:13 | | | | | |
| | | 40 | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | 30% | | | | | |
| | | 41 | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | 54,54% | | | | | |
| | | 42 | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | 42% | Rp12.745.000 | | | | |
| | | 43 | Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | 82% | | | | | |
| | | 44 | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | 51,17% | | | | | |
| | | 45 | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil | 87% | | | | | |
| | | 46 | Persentase guru yang meningkat jenjang karir | 0,15% | | | | | |
| | | 47 | Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | 0,69% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 48 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 89% | | | | | |
| | | 49 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | 37,30% | | | | | |
| 11 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | 50 | Nilai Kinerja Anggaran | 92,84 | Rp259.980.000 | | | | |
| 12 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | 51 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | 60% | Rp6.810.000 | | | | |
| | | 52 | Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75 | 1,25 | | | | | |
| 13 | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN | 53 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 95 | Rp300.000.000 | | | | |
| | | 54 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | 50% | | | | | |
| | | 55 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 100% | Rp3.405.000 | | | | |
| | | 56 | Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | 100% | | | | | |
| | | 57 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | 75% | | | | | |
| 14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 58 | Indeks Profesionalisme ASN | 63,35 | | | | | |
| | | 59 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | 65 | Rp134.983.343.000 | | | | |
| | | 60 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | 15 | | | | | |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum | 61 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | 100% | Rp6.810.000 | | | | |
| 16 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 62 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | 72% | Rp5.900.000 | | | | |
| | | 63 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | 64% | Rp1.064.410.000 | | | | |
| 17 | Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi | 64 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | 95 | | | | | |
| | | 65 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | 11% | | | | | |
| 18 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | 66 | Indeks Pembangunan Statistik | 2,72 | | | | | |
| | | 67 | Persentase data statistik yang dipublikasi | 10% | | | | | |
| 19 | Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan | 68 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | 90% | | | | | |
| | | 69 | Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama | 1,67% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70 | Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | 11% | | | | | |
| | | 71 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | 11% | | | | | |
| | | 72 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | 90% | | | | | |
| | | 73 | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | 90% | | | | | |
| | | 74 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 92,84 | | | | | |

**Lampiran III:** Matrik Rencana Aksi Tahun 2025

# RENCANA AKSI TAHUN 2025
# KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

| Rencana Kinerja (PERKIN 2025) | | | | | Rencana Kinerja Anggaran (RKA-KL 2025) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kode SK** | **Sasaran Kegiatan (SK) / Rencana Hasil Kerja Pimpinan Yang Diintervensi (RHK Pimp)** | **Kode IKSK** | **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) / Rencana Hasil Kerja (RHK)** | **Target** | **Kode Keg / RO / Sub Komp.** | **Kegiatan / RO / Sub Komponen** | **Volume / Satuan** | **Anggaran** | **Rencana Waku Pelaksanaan** | **Penanggung Jawab** |
| **BIDANG AGAMA** | | | | | | | | | | |
| SK-1 | Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama | IKSK-1.1. | Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 | 83 | 5620.QDB.001 | FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik | 1 Lembaga | 50.000.000 | TW1 | 1. Lukman Nulhakim 2. Fanani Rahman 3. Masruchah |
| | | IKSK-1.2. | Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS | 16,9 | 2104.UAI.005.051.A | KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) Kab/Ko | 27.0 Lembaga | 5.500.000 | April | 1. Anwari. 2. Sunarto |
| | | IKSK-1.3. | Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS | 79,49 | 2124.QDD.001.053.A | Cegah dini dan Deteksi Dini Kab/kota | 10.0 Kelompok Masyarakat | 15.000.000 | Mei | 1.`Mansur 2. Nurullah |
| | | IKSK-1.4. | Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha | 83,33 | 2123.PEG.001.053.A | Pengiriman Tim Pendukung MTQ Perwakilan Kabupaten pada Pengiriman Tim Pendukung MTQ Perwakilan Kabupaten pada Tk. Propinsi | 1.0 Kegiatan, Paket Kegiatan | 6.500.000 | Oktober | Bimas Islam |
| | | | | | 2123.PEG.001.053.B | Pengiriman Tim Pendukung Kafilah MTQ Perwakilan Jawa Timur pada Tk. Nasional | | 10.900.000 | Oktober | |
| | | | | | 2123.PEG.001.053.C | Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Bagi LPTQ | | 6.600.000 | November | |
| | | IKSK-1.5. | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam | 3,52 | 2123.QDC.002.51.A | Event Implementasi berbasis lokasi KMB Kab/Kota (Dialog Pembahasan Isu Aktual) | 162 Orang | 36.000.000 | Mei | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | IKSK-1.6. | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | 74,71 | 2125.EBA.994. | Operasional KUA Kecamatan | 12.0 Layanan | 1.639.378.000 | Januari-Desember | Aisyiyah |
| | | | | | 2125.EBB.951.052.A | Pengadaan Peralatan dan Mesin Berupa Printer Passbook | 7.0 Unit | 84.000.000 | Januari | Pejabat Pengadaan dan PPK |
| | | | | | 2124.QEI.001.053.A | Revitalisasi BKM Kab./Kota | 1.0 Lembaga | 30.000.000 | Februari | Kasi Bimas |
| | | | | | 2123.QDD.002.051.A | Penguatan Pokja Majelis Taklim | 10.0 Kelompok Masyarakat | 20.000.000 | April | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | | | | 2123.QDD.002.052.A | Bantuan Majelis Taklim | 1.0 LBG | 7.000.000 | Maret | 1. Kasi Bimas |
| | | | | | 2123.QEI.002.053.A | Bantuan Ormas | 1.0 LBG | 15.000.000 | Maret | Kasi Bimas |
| SK-2 | Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang | IKSK-2.1. | Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja | 100 | 2104.QAA.002.53.A | Jasa Profesi dan Transport Penghulu | 20.000 Orang | 2.056.975.000 | Januari-Desember | Anwari |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | profesional, inklusif, dan berdampak | | berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | | 2123.QDD.001.051.A | Siaran Keagamaan Islam | 10.0 Kelompok Masyarakat | 7.000.000 | Mei | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | IKSK-2.2. | Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama | 01.24 | 2123.QDC.001.051.A | Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non ASN | 123.0 Orang | 1.476.000.000 | Februari s/d Selesai | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | IKSK-2.3. | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi | 70,05 | 2123.QDC.003.051.A | Pelahan Pembuatan Konten Kreaf Materi Penyuluhan Kab./Kota | 50.0 Orang | 19.000.000 | Februari | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | | | | 2123.QEI.002.051.A | Pembinaan Dai dan Daiyah Tingkat Kab/Ko | 20.0 Lembaga | 20.000.000 | Mei | 1.Mansur 2. Sunarto |
| | | IKSK-2.4. | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah | 0,5 | | | 5000 Lanjutan Program Gemini | | Juni | KUA, Madrasah, Pontren |
| | | IKSK-2.5. | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan | 8,33 | 2104.QDE.001.051.A | Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi | | 22.500.000 | April | KUA Revitalisasi |
| | | | | | 2104.QDE.001.051.B | Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga Sakinah Tingkat Kab/Kota | | 1.000.000 | April | Kasi Bimas |
| | | IKSK-2.6. | Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat | 20 | 2124.QMB.001.052.A | Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota) | 1.0 layanan | 6.000.000 | Februari | Tim Kalibrasi |
| | | IKSK-2.7. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan | 0,84 | | | | | | Zawa |
| | | IKSK-2.8. | Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional | 0,5 | | | | | Januari-Desember | Zawa |
| SK-3 | Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji | IKSK-3.1. | Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | 5 | | | | | | PHU |
| SK-4 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | IKSK-4.1. | Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan | 80,5 | 2147.QAA.001.054.A | Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler | 374 Orang | 6.432.000,00 | 22/04/2025 s.d 31/08/2025 | PHU |
| | | IKSK-4.2. | Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu | 86,5 | 2147.QAA.001.057.A | Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait | 374 Orang | 660.000,00 | 11/02/2025 | PHU |
| | | | | | 2147.QAA.001.057.B | Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jemaah Haji Bermasalah | | 4.288.000,00 | 24/02/2025 s.d 30/04/2025 | PHU |
| | | | | | 2147.QAA.001.061.A | Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah (Embarkasi / Debarkasi) | | 4.288.000,00 | 16/05/2025 s.d 31/07/2025 | PHU |
| | | | | | 2150.EBA.958.053.A | Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah | 1 Layanan | 700.000,00 | 28/02/2025 | PHU |
| | | | | | 2150.EBA.994.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 Layanan | 145.000.000,00 | 01/02/2025 s.d 31/08/2025 | PHU |
| SK-5 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | IKSK-5.1. | | 81 | 2126.QDB.001.051.A | Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/kantor cabang PPIU | 3 Lembaga | 660.000,00 | 03/02/2025 | PHU |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | | 2126.QDB.001.054.A | Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah | 3 Lembaga | 660.000,00 | 25/06/2025 | PHU |
| | | | | | 2148.QDC.001.051.A | Koordinasi Rekrutmen Petugas Haji | 40 Orang | 4.288.000,00 | 01/08/2025 | PHU |
| | | | | | 2148.QDC.001.051.B | Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab./Kota | 40 Orang | 2.284.000,00 | Agustus 2025 | PHU |
| | | | | | 2148.QDC.001.052.A | Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas | | 600.000,00 | 14/04/2025 | PHU |
| | | IKSK-5.2. | Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | 72 | 2148.QDC.002.051.A | Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA | 955 Orang | 1.320.000,00 | 28/03/2025 | PHU |
| | | | | | 2150.EBA.962.052.A | Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji | 1 Layanan | 6.432.000,00 | 01/02/2025 s.d 30/07/2025 | PHU |
| SK-6 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji | IKSK-6.1. | Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); | 82,05 | | | | | | PHU |
| **BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH** | | | | | | | | | | |
| SK-7 | Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan | IKSK-7.1. | Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik | 0,5 | | | | | Januari - Desember | Pontreen |
| SK-8 | Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas | IKSK-8.1. | Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 30,5 | | terlaksananya satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 1 KEG | 0 | Juli | Joni , Ayu |
| | | IKSK-8.2. | Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha) | 12,,00 | | Pengumpulan dan pemutakhiran data Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) | 1 KEG | 0 | Juli | Abul Hasan, Ayu |
| | | IKSK-8.3. | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | 28,64 | | terlaksananya satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | 1 KEG | 0 | Agus | Samsuni, Afif |
| | | IKSK-8.4. | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | 2.619 | | | | | | |
| SK-9 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang | IKSK-9.1. | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:a. Literasi membaca b. Numerasi | 90,25 | | Terlaksananya kegiatan Asesmen Tingkat Provinsi :a. Literasib. Numerasi | 3 KEG | 0 | Agus - Okto | Samsuni, Afif |
| | | IKSK-9.2. | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | 92 | | | | | Februari | Abul Hasan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan | IKSK-9.3. | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 82,68 | | Terlaksananya pembinaan kepada satuan pendidikan dalam penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah | 2 KEG | 0 | Juli - September | Joni , Ayu |
| | | IKSK-9.4. | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | 250 | | Tersedianya data jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama | 1 KEG | 0 | Januari - Desember | Ayu , Afif |
| | | IKSK-9.5. | Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | 0,5 | | Tersedianya data jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina | 1 KEG | 0 | Januari - Desember | Ayu , Afif |
| | | IKSK-9.6. | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | 56 | | Terlaksananya pembinaan kepada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | 1 KEG | 0 | Agustus - September | Samsuni, Joni |
| | | IKSK-9.7. | Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | 74,5 | | tercapainya satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | 1 KEG | 0 | Juli | Abul Hasan, Robert |
| | | IKSK-9.8. | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara | 0,98 | | Tercapainya satuan pendidikan unggul yang terselenggara | 1 KEG | 0 | Juli | Samsuni - Afif |
| | | IKSK-9.9. | Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual | 1 | | | | | | |
| | | IKSK-9.10. | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 0,3 | | Pengiriman Delegasi Juara PAIS LOVE Festival tingkat Provinsi | 2 Keg. | Rp 9.900.000 | Mei s.d, Juni 2025 | Tolak Efendi, S.Pd.I |
| | | IKSK-9.11. | Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | 65,8 | | | | | | |
| | | IKSK-9.12. | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | 51 | | | | | | |
| SK-10 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan | IKSK-10.1. | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | 40 | | Rapat koordinasi terkait peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik | 1 KEG | 0 | Januari - Desember | Joni , Ayu |
| | | | | | | Update Data pada Aplikasi SIAGA PENDIS | GPAI TK : 93, GPAI SD : 592, GPAI SMP : 194, GPAI SMA : 71, GPAI SMK : 53 | x | Juli 2025 | RB. Moh. Ainul Yakin, SE |
| | | IKSK-10.2. | Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP | 01.13 | | | | | | |
| | | IKSK-10.3. | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang | 30 | | terlaksananya tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | 1 KEG | 0 | November | Joni , Ayu |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | | | | | | | |
| | | IKSK-10.4. | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | 54,54 | | | | | | |
| | | IKSK-10.5. | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | 42 | | Pelaksanaan bimbingan teknis/workshop peningkatan kompetensi guru untuk persiapan AKG | 1 KEG | 0 | Juli - Desember | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.6. | Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | 82 | | Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan AKK serta analisis capaian nilai Kepala Madrasah | 1 KEG | 0 | Mei - Juni | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.7. | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | 51,17 | | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | 1 KEG | 0 | Juli - Desember | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.8. | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil | 87 | | Terlaksananya Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) dan tersedianya data nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil | 1 KEG | 0 | November - Desember | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.9. | Persentase guru yang meningkat jenjang karir | 0,15 | | Tersedianya data Guru yang meningkat jenjang karir | 1 KEG | 0 | April - Oktober | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.10. | Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | 0,69 | | Tersedianya data Pengawas yang meningkat jenjang karir. | 1 KEG | 0 | April - Oktober | Joni - Imam Hanafi |
| | | IKSK-10.11. | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 89 | | Tercapainya jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 1 KEG | 0 | November - Desember | Joni - Ayu |
| | | IKSK-10.12. | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | 37,3 | | | | | | |
| **BIDANG TATA KELOLA** | | | | | | | | | | |
| SK-11 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | IKSK-11.1. | Nilai Kinerja Anggaran | 92,84 | 2102.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 Dokumen | 3.405.000 | Maret, Juni, September dan November | 1. Asih Sofiani 2. Mohammad Rasul |
| SK-12 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | IKSK-12.1. | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | 60 | 2100.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 4 Dokumen | 3.405.000 | Maret, Juni, September dan November | 1. Asih Sofiani 2. Ernita 3. Ishmah Maulidah |
| | | IKSK-12.2. | Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75 | 1,25 | | | | | | Tim ZI |
| SK-13 | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN | IKSK-13.1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 95 | 2100.EBA.994<br>6708.EBA.994 | Layanan Perkantoran<br>Layanan Perkantoran | 12 Layanan<br>1 Layanan | 18.651.103.000<br>35.831.869.000 | Januari - Desember<br>Januari - Desember | 1. Ernita Byduri 2. Asih Sofiani 3.Galuh AP |
| | | IKSK-13.2. | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | 50 | | | | | | 1. Moh. Rizqi |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IKSK-13.3. | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 100 | | | | | | 1. Sofie 2. Lukluil maknun 3. Ali Wahyudi |
| | | IKSK-13.4. | Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | 100 | | | | | | 1. Sofie 2. Lukluil maknun 3. Ali Wahyudi |
| | | IKSK-13.5. | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | 75 | | | | | | 1. Moh. Rizqi |
| SK-14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | IKSK-14.1. | Indeks Profesionalisme ASN | 63,35 | 2103.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 586.273.000 | Januari - Desember | 1. Ernita Byduri 2. Asih Sofiani 3.Galuh AP |
| | | IKSK-14.2. | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | 65 | | | | | | 1. Galuh 2. Muzayyanatul I 3. Nurhasan |
| | | IKSK-14.3. | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | 15 | 2099.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | 40 Orang | 3.405.000 | Februari | 1. Muzayyanatul Illiyah 2. Galuh A.P 3. Mardiyah |
| SK-15 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum | IKSK-15.1. | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | 100 | 2098.EBA.957 | Layanan Hukum | 1 Layanan | 3.405.000 | Februari | 1. Lukman Nulhakim 2. Fanani Rahman 3. Mujib |
| SK-16 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | IKSK-16.1. | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | 72 | 2103.EBA.962 | Layanan Umum | 1 Layanan | 300.000 | Februari | 1. Salimurrahman 2. Moh Rizky |
| | | IKSK-16.2. | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | 64 | 2103.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 5 Unit, m2, Paket | 8.791.000 | Februari | 1. Mujib 2. Rizky 3. Asih Sofiani |
| SK-17 | Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi | IKSK-17.1. | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | 95 | | | | | | 1. Fanani 2. Rozikin 3. Susmiyati |
| | | IKSK-17.2. | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | 11 | | | | | | 1. Fanani 2. Rozikin 3. Firman |
| SK-18 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | IKSK-18.1. | Indeks Pembangunan Statistik | 2,72 | | | | | | 1. Fanani 2. Rozikin 3. Mujib |
| | | IKSK-18.2. | Persentase data statistik yang dipublikasi | 10 | | | | | | 1. Fanani 2. Rozikin 3. Mujib |
| SK-19 | Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan | IKSK-19.1. | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | 90 | | | | | | 1. Siti Khairrunisah 2. Lukman NulHakim 3. Mujib |
| | | IKSK-19.2. | Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama | 1,67 | 2101.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1 Layanan | 3.405.000 | Februari | 1. Lukman Nulhakim 2. Mohammad Rasul 3. Siti Maftuhah |
| | | IKSK-19.3. | Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | 11 | | | | | | 1. Susmiyati 2. Mujib 3. Firman H |
| | | IKSK-19.4. | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi | 11 | 2106.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1 Layanan | 3.405.000 | Februari | 1. Susmiyati 2. Mujib 3. Firman H |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | | | | | | | |
| | | IKSK-19.5. | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | 90 | | | | | Januari-Desember | 1. Fanani R 2. Rozikin |
| | | IKSK-19.6. | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | 90 | 2102.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 Dokumen | 3.405.000 | Maret | 1. Sumarning 2. Siti Khairunnisah 3. Nova DP |
| | | IKSK-19.7. | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 92,84 | | | | | | 1. Sumarning 2. Siti Khairunnisah 3. Nova DP |

**Lampiran IV:** Matrik Renacana Penarikan Dana Triwulan I, II, III dan IV

## RENCANA PENARIKAN DANA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2025
## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

| KODE | PROGRAM / AKTIFITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / DETIL | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | RENCANA PENARIKAN DANA | | | | | | | | | | | | REALISASI | SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SD (Sumber Dana) | JAN | FEB | MRT | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |